

**PENDAFTARAN TANAH BAGI MASYARAKAT  
DI WILAYAH KAMPUNG TUA KOTA BATAM**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister*

*Kenotariatan*



**Disusun Oleh:**

**MAYSHA ANDINI**

**NIM. 2220122044**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

# **PENDAFTARAN TANAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KAMPUNG TUA KOTA BATAM**

(Maysha Andini, 2220122044, Program Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 108 halaman, 2025)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat penyelesaian legalitas lahan di 37 titik Kampung Tua belum dapat dituntaskan, sehingga pendaftaran tanah bagi masyarakat Kampung Tua belum dapat direalisasikan seluruhnya dan adanya perbedaan proses pengurusan sertifikat dengan daerah lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah di wilayah Kampung Tua Kota Batam, untuk mengetahui jenis hak atas tanah yang diberikan pada masyarakat diwilayah Kampung Tua Kota Batam, dan hambatan dalam penerbitan sertifikat untuk masyarakat Kampung Tua Kota Batam dan Rumusan masalah difokuskan pada pendaftaran tanah, jenis hak atas tanah yang diberikan pada masyarakat diwilayah Kampung Tua, dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pendaftaran tanah Kampung Tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teori kepastian hukum, teori implementasi kebijakan dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah bagi masyarakat Kampung Tua belum dapat direalisasikan seluruhnya Penyebabnya adalah sudah diterbitkannya PL kepada pihak investor, tanah Kampung Tua dinyatakan belum *clear and clean* dan belum adanya sinkronisasi antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sehingga terjadi tumpang tindih dalam mengambil kewenangan. Proses pendaftaran tanah Kampung Tua berjalan lancar setelah diterbitkan PP nomor 62 tahun 2019, yang menyatakan Kepala BP Batam dijabat *ex-officio* Walikota Batam. Dengan demikian kewenangan dan kebijakan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam telah sejalan. Prosedur pengurusan sertifikat di Batam berbeda dengan daerah lain, perbedaan itu terletak pada; (1) pemohon harus mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat dari BP Batam dan; (2) Perlunya SK Capes (Calon Peserta) dari Walikota Batam.

**Kata Kunci :** Pendaftaran tanah, Kampung Tua Kota Batam, Jenis-jenis Sertifikat

**LAND REGISTRATION FOR THE COMMUNITY  
IN THE KAMPUNG TUA AREA OF BATAM CITY**

(Maysha Andini, 2220122044, Master of Notary Program , Postgraduate Faculty of Law,  
Andalas University, 108 Pages, 2025)

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the fact that the legality of land in 37 points of Kampung Tua has not been completed, so that land registration for the Kampung Tua community has not been fully realized and there are differences in the certificate processing process with other areas. The purpose of the study is to determine the land registration process in the Kampung Tua area of Batam City, to determine the types of land rights granted to the community in the Kampung Tua area of Batam City, and the obstacles in issuing certificates for the Kampung Tua community of Batam City and the formulation of the problem is focused on land registration, types of land rights granted to the community in the Kampung Tua area, and the obstacles found in the registration of Kampung Tua land. This study uses an empirical legal method with the theory of legal certainty, the theory of policy implementation and the theory of authority. The results of the study show that land registration for the Kampung Tua community has not been fully realized. The cause is that the PL has been issued to the investor, the Kampung Tua land is declared not yet clear and clean and there has been no synchronization between the Batam City Government and BP Batam so that there is an overlap in taking authority. The Kampung Tua land registration process went smoothly after the issuance of PP number 62 of 2019, which stated that the Head of BP Batam was held ex-officio by the Mayor of Batam. Thus, the authority and policies between the Batam City Government and BP Batam are in line. The certificate processing procedure in Batam is different from other areas, the difference lies in; (1) the applicant must obtain a certificate issuance recommendation from BP Batam and; (2) The need for a Capes (Prospective Participant) SK from the Mayor of Batam.*

**Keywords:** Land registration, Kampung Tua Batam City, Types of Certificates